



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2022) pp: 2753-2759

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kautsar Fatin Dharmawan Nasution<sup>1</sup>, M. Deni Damara<sup>2</sup>, Bunga Ananda<sup>3</sup>, Armin Rahmansyah Nasution<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

<sup>1</sup>[kosarfatin@gmail.com](mailto:kosarfatin@gmail.com), <sup>2</sup>[deni.7222540003@mhs.unimed.ac.id](mailto:deni.7222540003@mhs.unimed.ac.id), <sup>3</sup>[bungaananda523@gmail.com](mailto:bungaananda523@gmail.com), <sup>1</sup>[armin@unimed.ac.id](mailto:armin@unimed.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika ekonomi politik dalam penganggaran dan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia selama periode 2014–2024 dengan menekankan bagaimana kepentingan politik memengaruhi kebijakan fiskal dan implementasi program sosial. Dalam rentang waktu tersebut, anggaran bansos mengalami peningkatan yang sangat signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19 serta menjelang Pemilu 2024, sehingga menimbulkan dugaan adanya political budget cycle ketika pemerintah meningkatkan belanja sosial untuk memperoleh dukungan elektoral. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis kajian literatur, penelitian ini membahas bagaimana penyusunan anggaran dan mekanisme penyaluran bansos sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat rentan, melainkan dipengaruhi oleh agenda politik jangka pendek yang berpotensi menggeser orientasi kebijakan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik tidak hanya memicu lonjakan anggaran pada tahun politik, tetapi juga menyebabkan berbagai distorsi seperti ketidaktepatan sasaran, pendataan yang tidak akurat, personalisasi bantuan, serta munculnya relasi patronase antara pemerintah dan penerima manfaat. Kondisi tersebut memberikan dampak negatif terhadap efektivitas program perlindungan sosial karena distribusi bantuan tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat rentan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola bansos melalui transparansi anggaran, perbaikan basis data, peningkatan kapasitas pengawasan, serta keterlibatan publik agar penyaluran bansos kembali berfungsi optimal dan bebas dari kepentingan elektoral yang dapat merugikan masyarakat.

**Kata kunci:** Ekonomi Politik, Bantuan Sosial, Anggaran, Kesejahteraan, Kebijakan Publik

### 1. Latar Belakang

Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal Indonesia yang berfungsi menjaga stabilitas sosial, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat rentan. Dalam dua dekade terakhir, terutama sejak reformasi perlindungan sosial pada 2010-an, pemerintah terus memperluas alokasi anggaran bansos untuk memperkuat jaring pengaman sosial. Namun demikian, peningkatan alokasi ini tidak hanya mencerminkan komitmen negara terhadap kesejahteraan publik, tetapi juga menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana dinamika politik mempengaruhi proses perumusan dan penyaluran bantuan sosial. Perdebatan tersebut semakin mengemuka menjelang tahun politik, terutama ketika lonjakan anggaran sosial beririsan dengan agenda elektoral.

Tren data anggaran menunjukkan bahwa sepanjang 2014–2024, belanja perlindungan sosial mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2014, alokasi bantuan sosial tercatat sekitar Rp 91,8 triliun dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2019, realisasi bansos mencapai sekitar Rp 91,75 triliun, sementara pada masa pandemi COVID-19 jumlah tersebut melonjak drastis, di mana realisasi bansos tahun 2021 mencapai Rp 173,3 triliun sebagai bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Eskalasi anggaran ini masih berlanjut hingga 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 496,8 triliun pada 2024, yang oleh banyak pengamat dipandang sebagai salah satu angka tertinggi selama satu dekade terakhir. Peningkatan tersebut tidak hanya dikaitkan dengan kebutuhan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, tetapi juga dengan momentum pemilihan umum serentak 2024, sehingga memunculkan dugaan adanya politisasi dalam kebijakan bansos.

---

Ekonomi Politik Anggaran dan Penyaluran Bantuan Sosial di Indonesia: Analisis Kepentingan Politik dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Fenomena ini sejalan dengan kerangka teori political budget cycle yang menjelaskan bahwa pemerintah cenderung meningkatkan belanja populis, termasuk bansos, menjelang pemilu untuk membangun dukungan elektoral. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan pola serupa. Priyono dan Wagner (2018), melalui analisis terhadap ratusan daerah yang mengikuti pilkada serentak, menemukan bahwa belanja sosial dan hibah meningkat secara signifikan ketika petahana mencalonkan diri kembali. Sementara itu, Khoirunrofik dan Rahmawati (2021) menegaskan bahwa lonjakan anggaran menjelang pemilu lebih kuat terjadi pada daerah yang lemah dalam konsistensi perencanaan anggaran, sehingga membuka ruang lebih luas bagi intervensi politik. Penelitian lain oleh Ghaniyar dan Qibthiyyah (2022) menunjukkan bahwa tahun politik tidak hanya memengaruhi struktur belanja sosial, tetapi juga berhubungan dengan meningkatnya kerugian daerah berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga menggambarkan adanya tekanan untuk menggeser alokasi belanja ke arah yang lebih menguntungkan aktor politik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan bansos Indonesia berada pada persimpangan antara kebutuhan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan potensi manipulasi politik. Kenaikan anggaran hingga 2024 menunjukkan ekspansi fiskal yang besar, namun pada saat yang sama memunculkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sepenuhnya berorientasi pada kemanfaatan publik atau turut dipengaruhi oleh motif elektoral. Ketika bansos yang seharusnya bersifat universal dan berbasis kebutuhan ikut terseret dalam kepentingan politik, maka risiko ketidaktepatan sasaran, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakadilan sosial semakin besar. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dinamika ekonomi politik yang mempengaruhi proses penganggaran dan penyaluran bansos, serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada bagaimana kepentingan politik mempengaruhi alokasi anggaran dan penyaluran bansos di Indonesia dalam rentang 2014–2024, serta bagaimana politisasi tersebut berdampak pada efektivitas dan kesejahteraan penerima bantuan. Dengan memahami relasi antara kekuasaan politik, kebijakan fiskal, dan implementasi bantuan sosial, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat tata kelola bansos agar tetap berpihak pada masyarakat rentan dan bebas dari distorsi politik.

## **2. Kajian Teoritis**

### **2.1 Ekonomi Politik**

Ekonomi politik merupakan sekumpulan teori yang menelaah hubungan timbal balik antara proses politik dan aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, politik dan ekonomi dipandang saling memengaruhi dalam pengaturan alokasi sumber daya, pembagian pendapatan, serta upaya menjaga stabilitas dalam suatu sistem. (Purba et al., 2024).

Menurut Sugiyanto, ekonomi politik dapat dipahami sebagai kajian mengenai relasi-relasi sosial, terutama hubungan kekuasaan, yang saling memengaruhi proses produksi, distribusi, dan konsumsi berbagai sumber daya. Pendekatan ekonomi politik ditempatkan dalam kerangka paradigma kritis, yaitu perspektif teoretis yang tidak hanya berupaya menjelaskan realitas sosial, tetapi juga memiliki orientasi praktis untuk mendorong perubahan sosial.

Ekonomi politik Keynesian muncul sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik Adam Smith, yang meyakini bahwa mekanisme pasar bebas mampu secara otomatis menciptakan kesejahteraan bagi semua orang. Berlawanan dengan pandangan tersebut, Keynes menegaskan bahwa pasar tidak selalu dapat mencapai keseimbangannya sendiri dan justru rentan mengalami ketidakstabilan, terutama ketika perekonomian berada dalam kondisi resesi atau depresi. Yustika (2009).

### **2.2 Bantuan Sosial**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri, 2011). Bantuan sosial merupakan bentuk dukungan yang diberikan secara tidak berkelanjutan dan bersifat selektif kepada masyarakat dalam wujud uang atau barang, dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, baik pemerintah daerah sebagai penyalur maupun masyarakat atau lembaga kemasyarakatan sebagai penerima memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan penggunaan bantuan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Pusat Penyuluhan Sosial (Tristanto, 2020), bantuan sosial merupakan bentuk dukungan berupa transfer dana maupun barang yang bertujuan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pemerataan kesejahteraan serta memberikan perlindungan bagi rumah tangga ketika terjadi perubahan pendapatan. Program ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk standar hidup layak, kecukupan gizi minimal, serta membantu keluarga dalam menghadapi berbagai risiko sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, bantuan sosial merupakan pemberian dukungan kepada masyarakat dalam bentuk uang maupun barang yang bersifat tidak berkelanjutan dan diberikan secara selektif. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **2.3 Anggaran**

Menurut, (Binilang et al., 2023). Anggaran, merupakan alat penting dalam pengendalian keuangan yang digunakan oleh berbagai jenis organisasi, baik yang berorientasi profit maupun nirlaba. Anggaran disusun melalui proses yang sistematis dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai moneter, yang menggambarkan seluruh rencana kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.

Menurut Mardiasmo (2018:75), anggaran merupakan pernyataan mengenai rencana kinerja yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu dan disajikan dalam bentuk nilai finansial. Sementara itu, penganggaran adalah proses atau metode yang digunakan untuk merumuskan serta menyusun rencana anggaran tersebut. Halim dan Iqbal (2019) menjelaskan bahwa anggaran adalah suatu bentuk informasi atau pernyataan mengenai rencana maupun kebijakan keuangan yang disusun oleh organisasi atau perusahaan untuk periode tertentu. Anggaran tersebut berisi estimasi mengenai pendapatan dan belanja yang diproyeksikan akan terjadi selama jangka waktu tersebut.

### **2.4 Kesejahteraan**

Menurut Midgley (2024), kesejahteraan adalah suatu kondisi ketika individu dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Midgley menegaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi semata, tetapi juga dari kemampuan warga untuk mengakses layanan publik yang berkualitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, kesejahteraan merupakan hasil interaksi antara kebijakan negara, distribusi sumber daya, dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup.

Menurut Azizah (2025), kesejahteraan adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan non-material manusia yang dilihat melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah*, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam pandangannya, kesejahteraan modern tidak hanya menekankan peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan etika, sehingga pembangunan kesejahteraan harus memadukan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. Pendekatan ini relevan diterapkan dalam konteks kebijakan sosial karena memberikan kerangka evaluasi kesejahteraan yang lebih komprehensif.

### **2.5 Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2023), kebijakan publik adalah serangkaian keputusan pemerintah yang disusun untuk merespon masalah-masalah publik melalui program, regulasi, dan alokasi sumber daya. Kebijakan publik, menurut Dunn, tidak berdiri secara teknokratis, tetapi merupakan hasil proses politik yang melibatkan aktor negara, birokrasi, dan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pilihan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk mencapai tujuan masyarakat melalui tindakan yang terencana.

Menurut Trisnawati et al. (2025), kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang diarahkan untuk menciptakan public value melalui penyediaan manfaat sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Mereka menjelaskan bahwa nilai dari kebijakan publik tidak hanya diukur dari sisi output seperti jumlah bantuan yang disalurkan, tetapi juga dari legitimasi, dukungan masyarakat, dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Pendekatan ini menegaskan bahwa kebijakan publik yang efektif harus menciptakan nilai sosial, diterima masyarakat, dan dioperasionalkan dengan baik.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam dinamika ekonomi politik dalam proses penganggaran dan penyaluran bantuan sosial di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara kontekstual, khususnya bagaimana kepentingan politik memengaruhi pengambilan keputusan terkait anggaran serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang memiliki kredibilitas akademik dan relevansi kuat dengan topik ekonomi politik anggaran dan bantuan sosial. Jurnal-jurnal tersebut mencakup artikel yang membahas dinamika politik dalam pengelolaan anggaran publik, efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta pengaruh kebijakan fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran jurnal ilmiah nasional yang fokus pada isu ekonomi politik, anggaran publik, perilaku politik dalam kebijakan sosial, serta implementasi bantuan sosial pemerintah.

#### **4. Hasil dan Diskusi**

##### **4.1 Pola Kenaikan Anggaran Bansos 2014–2024 dan Indikasi Pengaruh Politik**

Peningkatan anggaran bantuan sosial selama 2014–2024 menunjukkan pola eskalasi yang tidak hanya menggambarkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial, tetapi juga mengindikasikan sensitivitas fiskal terhadap dinamika politik nasional. Data dalam dokumen menunjukkan bahwa anggaran bansos naik dari sekitar Rp 91,8 triliun pada 2014 menjadi Rp 173,3 triliun pada 2021, dan melonjak drastis hingga Rp 496,8 triliun pada 2024, yang merupakan salah satu level tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Lonjakan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan sosial tidak berjalan secara linear berdasarkan kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi mengikuti momen-momen tertentu yang secara regulatif maupun politis sangat strategis bagi pemerintah. Pola kenaikan anggaran tersebut memperlihatkan karakteristik political budget cycle, yakni kecenderungan pemerintah meningkatkan pengeluaran sosial menjelang kontestasi elektoral demi memperkuat legitimasi publik dan memperoleh dukungan pemilih. Analisis literatur pada file menegaskan bahwa dalam berbagai konteks pilkada maupun pemilu nasional, belanja sosial selalu meningkat ketika petahana mencalonkan diri kembali, sebagaimana ditemukan oleh Priyono & Wagner (2018), Khoirunurrofik & Rahmawati (2021), serta Ghaniyar & Qibthiyah (2022).

Temuan ini selaras dengan teori ekonomi politik yang memandang anggaran sebagai instrumen kekuasaan yang tidak netral, melainkan sarat motif untuk mempertahankan posisi politik. Kenaikan anggaran yang terjadi pada tahun politik 2024 menjadi contoh krusial bagaimana kebijakan fiskal dapat dimobilisasi sebagai alat populisme politik. Meskipun pemerintah dapat berargumen bahwa peningkatan tersebut berkaitan dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi, besarnya proporsi dan waktunya yang berdekatan dengan pemilu memperkuat dugaan bahwa kebijakan ini memiliki dimensi elektoral. Dari sudut pandang ekonomi politik kritis, fenomena ini menggambarkan relasi kuasa yang bekerja dalam instrumen fiskal, di mana pemerintah memanfaatkan belanja sosial untuk menciptakan citra responsif terhadap kesejahteraan publik sekaligus memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan kepedulian pemerintah.

Secara implisit, pola ini menunjukkan adanya ketergantungan kebijakan pada kepentingan jangka pendek elite politik dibandingkan kebutuhan jangka panjang masyarakat. Ketika anggaran bansos meningkat tajam hanya pada periode tertentu, efektivitas kebijakan menjadi tidak konsisten dan cenderung reaktif terhadap situasi politik. Selain itu, peningkatan yang berbasis pada agenda elektoral berpotensi menurunkan rasionalitas anggaran dan menggeser prioritas pembangunan yang seharusnya lebih merata. Dengan demikian, pola kenaikan anggaran 2014–2024 tidak hanya menjadi gambaran fiskal, tetapi juga indikator kuat bagaimana politik dan kepentingan elektoral mengintervensi keputusan terkait bansos.

Pola peningkatan anggaran bansos juga menunjukkan adanya perubahan orientasi fiskal yang semakin berpusat pada belanja-belanja yang bersifat langsung menyentuh masyarakat, yang secara politis lebih mudah dikapitalisasi oleh aktor-aktor pemerintahan. Hal ini sejalan dengan literatur ekonomi politik yang menganggap belanja sosial sebagai instrumen yang paling efektif untuk membangun persepsi positif terhadap pemerintah, terutama di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Ketika anggaran bansos meningkat secara tajam, seperti pada 2021 dan 2024, hal tersebut bukan hanya mencerminkan respons terhadap krisis atau kebutuhan sosial, tetapi juga strategi penguatan legitimasi dengan menampilkan negara sebagai aktor yang hadir dan peduli terhadap kehidupan

masyarakat rentan. Dengan kata lain, belanja bansos sering kali menjadi medium komunikasi politik dalam konteks hubungan antara negara dan warga.

Tidak hanya pada tataran nasional, dinamika ini juga tercermin dalam publikasi penelitian yang menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memodifikasi anggaran sosial menjelang pemilihan kepala daerah. Temuan yang dikompilasi dalam file menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat perencanaan anggaran yang lemah lebih rentan mengalami peningkatan belanja sosial yang tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan pada motif politik lokal. Hal ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bansos terjadi secara multi-level, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan dipengaruhi oleh konteks elektoral yang berbeda-beda. Ketika kondisi ini berlangsung secara sistemik, maka anggaran bansos tidak lagi diposisikan sebagai instrumen perlindungan sosial yang strategis, tetapi sebagai bagian dari siklus kekuasaan yang berulang dan menormalisasi patronase politik

Akibat dari pola tersebut adalah munculnya distorsi dalam proses pengambilan keputusan anggaran yang berpotensi melemahkan prinsip keadilan dan efektivitas kebijakan sosial. Kenaikan anggaran yang bersifat politis cenderung tidak disertai evaluasi mendalam terhadap dampak program, kelayakan target penerima, ataupun efektivitas mekanisme penyaluran. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa pengeluaran sosial sering kali lebih mencerminkan strategi untuk mempertahankan kekuasaan daripada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, melihat tren kenaikan anggaran bansos dalam rentang 2014–2024, dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal Indonesia berada dalam ruang ketegangan antara upaya memenuhi hak dasar warga dan strategi kalkulatif untuk memengaruhi perilaku politik masyarakat menjelang pemilu.

#### **4.2 Dinamika Ekonomi Politik dalam Penganggaran Bansos**

Dalam perspektif ekonomi politik, proses penganggaran bantuan sosial tidak pernah berdiri secara steril dari pengaruh kekuasaan. Literatur dalam file menegaskan bahwa anggaran merupakan arena perebutan kepentingan antara aktor negara, elite politik, dan kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh relasi kuasa serta struktur sosial yang membentuk proses pengambilan keputusan. Pendekatan ekonomi politik kritis menyatakan bahwa keputusan fiskal bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan representasi dari konfigurasi kepentingan yang sedang dominan. Oleh karena itu, dinamika dalam penyusunan anggaran bansos harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme politik yang menentukan siapa yang mendapatkan manfaat, siapa yang dikorbankan, dan bagaimana negara membangun legitimasi melalui distribusi sumber daya.

Keterlibatan kepentingan politik dalam alokasi bansos terlihat melalui bagaimana pemerintah memprioritaskan belanja sosial pada momen-momen tertentu, terutama mendekati tahun politik. Dalam literatur file, Purba et al. (2024) menekankan bahwa politik dan ekonomi saling memengaruhi dalam menentukan distribusi sumber daya, termasuk dalam kebijakan sosial. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pemerintah sering memanfaatkan anggaran bansos sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan dukungan publik. Konsep *political budget cycle* menjelaskan bahwa belanja populis seperti bansos ideal untuk menampilkan citra keberpihakan negara kepada kelompok rentan, sehingga mendorong peningkatan elektabilitas bagi aktor atau partai yang sedang berkuasa.

Di sisi lain, intervensi politik turut memengaruhi proses teknis perencanaan anggaran. Ketika motif elektoral memasuki ruang penganggaran, penyusunan anggaran tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada analisis kebutuhan sosial, tetapi ikut disesuaikan dengan strategi kampanye atau kepentingan pencitraan pemerintah. Penelitian Khoirunrofik dan Rahmawati (2021) yang dikutip dalam file menunjukkan bahwa daerah dengan perencanaan anggaran yang kurang disiplin lebih mudah mengalami distorsi politik, karena celah pengawasannya lebih besar dan struktur institusinya lebih lemah. Hal ini menjadi bukti bahwa proses penganggaran bansos rentan terhadap manipulasi di berbagai tingkat pemerintahan, terutama ketika sistem tata kelolanya belum sepenuhnya kuat.

Dominasi motif politik dalam penganggaran bansos menciptakan kondisi di mana mekanisme distribusi sumber daya menjadi tidak sepenuhnya berbasis pada prinsip keadilan dan kebutuhan objektif masyarakat. Yustika (2009), sebagaimana dirujuk dalam file, menjelaskan bahwa tanpa intervensi negara yang rasional dan adil, kebijakan ekonomi akan dikuasai oleh kepentingan kelompok tertentu yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. Dalam konteks bansos, ini berarti mereka yang memiliki kedekatan dengan elite politik atau berada dalam jaringan patronase memiliki potensi mendapatkan prioritas dalam implementasi program, sehingga mengikis prinsip

universalitas dan keadilan sosial. Relasi kuasa semacam ini menjadikan anggaran bansos bukan sekadar instrumen perlindungan sosial, tetapi juga alat reproduksi kekuatan politik.

Dinamika ekonomi politik seperti ini menunjukkan bahwa penganggaran bansos berada dalam ketegangan permanen antara idealisme perlindungan sosial dan pragmatisme politik. Ketika aktor politik melihat bansos sebagai aset strategis, terjadi kecenderungan untuk mengalokasikan anggaran secara berlebihan atau tidak tepat sasaran demi mencapai tujuan elektoral. Kondisi ini dapat menimbulkan inefisiensi anggaran dan melemahkan fungsi bansos sebagai jaring pengaman yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan. Dengan demikian, memahami dinamika ekonomi politik dalam penganggaran bansos menjadi krusial untuk menilai sejauh mana kebijakan sosial benar-benar berpihak pada kepentingan publik atau justru terkooptasi oleh kepentingan politik yang lebih sempit.

#### **4.3 Praktik Politisasi dalam Penyaluran Bansos**

Praktik politisasi dalam penyaluran bantuan sosial tampak melalui berbagai indikasi bahwa distribusi bansos sering tidak dijalankan secara murni berdasarkan kebutuhan masyarakat, tetapi dipengaruhi kepentingan aktor politik yang sedang berkuasa. Meskipun regulasi seperti Permendagri No. 32/2011 dan PMK 254/2015 telah menegaskan bahwa bantuan sosial harus bersifat selektif, tidak berkelanjutan, dan diberikan secara objektif, implementasi di lapangan menunjukkan kecenderungan penyimpangan akibat intervensi politik lokal maupun nasional. Distorsi ini muncul karena bansos merupakan instrumen yang sangat mudah digunakan sebagai medium politik elektoral, terutama untuk memperkuat kedekatan antara politisi dan penerima bantuan.

Politisasi penyaluran bansos terwujud dalam berbagai bentuk, termasuk personalisasi bantuan dengan simbol-simbol politik, penggunaan bansos sebagai ajang pencitraan, serta pendistribusian yang diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang memiliki afiliasi politik tertentu. Literatur yang dirangkum dalam file menunjukkan bahwa menjelang pemilu, intensitas penyaluran bantuan sering meningkat, disertai upaya sistematis untuk memperkuat identitas politik penguasa di benak masyarakat. Praktik ini memperlihatkan bagaimana bansos tidak hanya diposisikan sebagai instrumen kesejahteraan, tetapi juga sebagai alat komunikasi politik yang dapat dimanfaatkan untuk membangun loyalitas pemilih dalam jangka pendek.

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa meningkatnya politisasi penyaluran bantuan sosial kerap diiringi dengan ketidaktepatan sasaran penerima. Ketika aktor politik terlibat dalam proses pendataan atau distribusi, keputusannya tentang siapa yang menerima bantuan sering kali tidak lagi didasarkan pada indikator kemiskinan atau kerentanan, tetapi pada pertimbangan kedekatan sosial dan politik. Hal ini konsisten dengan temuan Ghaniyar & Qibthiyah (2022), yang menunjukkan bahwa pada tahun-tahun politik terjadi peningkatan kerugian daerah akibat pengelolaan anggaran yang tidak akuntabel, mengindikasikan adanya penyimpangan dalam implementasi program sosial. Ketidaktepatan sasaran tersebut bukan hanya menurunkan efektivitas bansos, tetapi juga memperburuk ketidakadilan dalam masyarakat.

Selain menimbulkan ketidaktepatan sasaran, politisasi bansos juga menghasilkan relasi patronase antara pemerintah dan masyarakat yang menerima bantuan. Ketika bansos dipaketkan bersama agenda elektoral, penerima cenderung merasa terikat secara politis atau berutang budi kepada pihak yang dianggap memberikan bantuan tersebut. Praktik patronase ini berpotensi memperlemah kemandirian politik masyarakat dan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi bansos digunakan untuk memelihara struktur kekuasaan, bukan untuk memberdayakan masyarakat secara substantif. Dengan demikian, praktik politisasi penyaluran bansos tidak hanya mengganggu efektivitas program sosial, tetapi juga mempengaruhi dinamika relasi negara-warga dan kualitas demokrasi.

Pada akhirnya, politisasi penyaluran bansos menciptakan situasi di mana program sosial yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pemerataan kesejahteraan justru menjadi arena reproduksi kepentingan politik. Distorsi distribusi, ketidaktepatan sasaran, hingga patronase politik menggambarkan bahwa penyaluran bansos tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan kebutuhan publik. Fenomena ini mempertegas pentingnya reformasi tata kelola distribusi bansos, terutama dalam memperkuat transparansi, mekanisme pendataan, dan pengawasan publik untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar kembali pada fungsi dasarnya: menjamin kesejahteraan masyarakat rentan, bukan kepentingan elektoral elite politik.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan bantuan sosial di Indonesia selama 2014–2024 berada pada persimpangan antara kebutuhan perlindungan sosial dan kepentingan politik jangka pendek. Kenaikan anggaran yang sangat signifikan, terutama menjelang pemilu 2024, menunjukkan indikasi kuat adanya political budget cycle yang memengaruhi proses penganggaran dan distribusi bansos. Intervensi politik ini tidak hanya berdampak pada lonjakan belanja sosial, tetapi juga menimbulkan persoalan ketidaktepatan sasaran, potensi penyalahgunaan anggaran, serta praktik patronase yang melemahkan tujuan utama program, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas bansos sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan fiskal dapat dijalankan secara akuntabel, transparan, serta bebas dari distorsi politik.

## Referensi

1. APBN Kementerian Keuangan RI. (2024). *Portal Data APBN*. <https://data-apbn.kemenkeu.go.id/>
2. Azizah, R. N. (2024). MODEL KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM TEORI EKONOMI MAKRO ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2).
3. Badan Pemeriksa Keuangan RI. (2014). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2014*. [https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine\\_selengkapnya\\_1406187441.pdf](https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine_selengkapnya_1406187441.pdf)
4. Binilang, M., Wokas, H. R., & Datu, C. V. (2023). Penerapan Activity Based Budgeting (ABB) Pada Anggaran Operasional Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 18(4), 323-332.
5. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2021). *Belanja Bantuan Sosial Tahun 2020*. Kementerian Keuangan RI. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/tapaktuan/id/publikasi-kppn/publikasi-kppn/berita-terbaru/2828-belanja-bansos.html>
6. DJPK Kementerian Keuangan RI. (2024). *Kajian Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2025*. [https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Final\\_kem\\_ppkf\\_2025.pdf.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2024/06/Final_kem_ppkf_2025.pdf.pdf)
7. Dunn, W. (2023). *Public Policy Analysis*. Routledge.
8. Ghaniyar, E. M., & Qibthiyah, R. M. (2021). Political budget cycle and financial losses: Evidence from Indonesian local governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 7(2), 223–239. <https://jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/668>
9. Halim dan Iqbal. 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
10. Katadata. (2019). *Belanja modal baru capai setengah, penyaluran bansos hampir mentok*. <https://katadata.co.id/finansial/makro/5e9a4c55b72ae/belanja-modal-baru-capai-setengah-penyaluran-bansos-hampir-mentok>
11. Kementerian Keuangan RI. (2022). *Tinjauan Ekonomi, Keuangan dan Fiskal Edisi I 2022*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1648713446\\_tekf\\_i\\_2022\\_30032022.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/tekf/file/1648713446_tekf_i_2022_30032022.pdf)
12. Khoirunurrofik, K., & Rahmawati, F. (2021). Planning consistency and political budget cycle in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(2), 160–173. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt/article/view/74442>
13. Kompas.id. (2024). *Gelontoran bansos di tahun pemilu*. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/04/gelontoran-bansos-di-tahun-pemilu>
14. Kompas Money. (2024). *Polemik bansos di tahun politik*. <https://money.kompas.com/read/2024/02/08/112619726/polemik-bansos-di-tahun-politik>
15. Mardiasmo, (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
16. Midgley, J., et al. (2024). Analisis Kesejahteraan dan Pembangunan Sosial di Masyarakat. *Jurnal Sosial & Humaniora*.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2011).
18. Priyono, S., & Wagner, A. (2018). Political budget cycles at subnational level: Evidence from Indonesian simultaneous local elections (Pilkada Serentak 2015). *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 2(3), 1–19. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/view/38>
19. Purba, B., Wijaya, M. F., Lumbantobing, M., & Ardhana, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Politik Keynesian dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 76-83.
20. Rizqiyati, C., & Setiawan, D. (2021). Political budget cycle in Indonesian local elections. *Jurnal ASET*, 23(2), 145–160. <https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/download/33879/15641>
21. Sekretariat Kabinet RI. (2021). *Dukungan APBN capai Rp187,84 triliun: Program perlindungan sosial 2021*. <https://setkab.go.id/dukungan-apbn-capai-rp18784-triliun-inilah-rincian-program-perindungan-sosial-bagi-masyarakat/>
22. Sugiyanto, Diah Rahmawati. 2015. Komodifikasi Berita Dibalik Ideologi Ekonomi Politik Media (Studi Pada Program ‘Polemik’ Di Radio Sindo Trijaya 104,6 FM Jakarta). *Jurnal Komunikasi*, Vol. 7, No. 1. Hal 59-60
23. Sulon, S. (2015). Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo Studi Kasus Dana Hibah dan Bantuan Sosial APBD 2013. *Jurnal ARISTO*, 5. Aristo. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/1>
24. Trisnawati, D., Hidayat, S., & Permana, R. (2025). Analisis Kebijakan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Public Value. *Jurnal Reformasi Administrasi*.
25. Trisanto. (2020). *Pusat Penyuluhan Sosial*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
26. Yustika. (2009). *Ekonomi Politik: Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.